

**Analisis Hukum Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  
Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota  
Kabanjahe, Kabupaten Karo**

**Ronaldo Christofer Ginting  
Munthe Npm. 2013010008**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Peran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap peran dan upaya satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo dan mengetahui apa saja hambatan yang di alami satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. Jenis penelitian yang yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang- undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis hukum terhadap peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe dilihat pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja dan Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja. Selain itu satuan polisi pamong praja sebagai suatu organisasi pemerintah melakukan peran penting dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe dimana peran Satpol PP tersebut meliputi perencanaan standar operasional prosedur (SOP), membuat perencanaan jadwal kegiatan penataan pedagang kaki lima (PKL) dan merancang perencanaan jadwal kegiatan penataan pedagang kaki lima (PKL). Upaya satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe yaitu, melakukan penertiban, melakukan tindakan setelah pedagang kaki lima di relokasi dan melakukan sosialisasi. Adapun hambatan yang dialami satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kota Kabanjahe adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mematuhi peraturan, kurangnya personil Satpol PP, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci : Analisis Hukum, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima**

***Legal Analysis of the Role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Controlling Street Vendors (PKL) in the City Kabanjahe, Karo Regency***

**Ronaldo Christofer Ginting  
Munthe Npm. 2013010008**

***ABSTRACT***

*This research discusses the Legal Analysis of the Role of Satpol PP (Prajapati Police Unit) in Controlling Street Vendors (PKL) in Kabanjahe City, Karo Regency. The aim of this research is to find out the legal analysis of the role and efforts of the civil service police unit in controlling street vendors in Kabanjahe City, Karo Regency and to find out what obstacles the civil service police unit experiences in controlling street vendors in Kabanjahe City, Karo Regency. The type of research used is empirical juridical research. Empirical juridical research aims to analyze problems by combining legal materials with primary data obtained in the field. Meanwhile, this research approach uses a statutory approach. What is meant by a statutory approach is to examine all laws and regulations related to the legal issues being raised. The legislative approach is carried out in the context of legal research for practical purposes as well as legal research for academic purposes.*

*The results of this research show that the legal analysis of the role of the civil service police unit in controlling street vendors in Kabanjahe City looks at article 6 of Government Regulation Number 16 of 2018 concerning the civil service police unit and Article 5 of Government Regulation Number 16 of 2018 concerning the civil service police unit. Apart from that, the civil service police unit as a government organization plays an important role in controlling street vendors in Kabanjahe City where the Satpol PP's role includes planning standard operating procedures (SOP), planning activity schedules for organizing street vendors (PKL) and designing schedule planning. street vendor (PKL) structuring activities. The efforts of the civil service police unit to control street vendors in Kabanjahe City include carrying out control, taking action after the street vendors are relocated and conducting outreach. The obstacles experienced by civil service police units in controlling street vendors in the city of Kabanjahe are a lack of awareness among some people to comply with regulations, a lack of Satpol PP personnel, a lack of facilities and infrastructure and a lack of community participation.*

***Keywords: Legal Analysis, Satpol PP, Street Vendors***